

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya keuangan syariah saat ini, semakin banyak juga lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Islam merupakan agama yang sangat peduli akan literasi. Banyak diterangkan juga Islam dalam memberikan pedoman mengenai hal dalam memperoleh pendapatan, penghasilan, menggunakannya, menabung, berinvestasi dan lain sebagainya dalam mengelola keuangan. Mengelola keuangan merupakan suatu hal yang penting bagi seseorang pribadi ataupun kelompok karena mampu mempengaruhi hasil dari kinerja tersebut.¹

Dalam masyarakat atau suatu negara tidak dapat dipungkiri adanya lembaga keuangan syariah karena hal tersebut merupakan salah satu sarana penting dalam perkembangan ekonomi. Terdapat dua jenis lembaga keuangan syariah yaitu lembaga keuangan syariah bank dan non bank, diantaranya lembaga keuangan syariah bank adalah BMI (Bank Muamalat Indonesia) dan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah). Sedangkan lembaga keuangan non bank yaitu AT (Asuransi Takaful), BMT (Baitul

¹ Diana Djuwita dan Ayus Ahmad Yusuf. (2018). "Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Kalangan UMKM dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha". *Jurnal Al-Amwal*. Vol. 10 No.1. hal. 108

Maal wa Tamwil), Kopoten (Unit simpan Pinjam dan Koperasi Pondok Pesantren) yang sudah tersebar diberbagai wilayah Indonesia. .²

Lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menjadi arah solusi keuangan yang mengarah pada riba. Namun faktanya, masyarakat di Indonesia yang mayoritas beragama Islam masih memiliki pangsa pasar yang rendah, maka dari itu, perlu ditingkatkan kembali bagi para pelaku ekonomi agar mampu mengambil keputusan yang tepat dan menghindari instrumen keuangan yang tidak sehat atau tidak jelas.

Literasi keuangan syariah adalah suatu pengetahuan dan pemahaman yang harus dimiliki bagi warga muslim karena hal tersebut mampu berdampak pada kesuksesan (*Al-Fallah*) baik didunia maupun di akhirat. Terdapat beberapa aspek dalam keuangan syariah diantaranya yaitu aspek pengelolaan keuangan semacam menabung untuk masa tua atau dana darurat yang sewaktu-waktu mungkin akan terjadi, aspek perencanaan keuangan semacam asuransi dan investasi, dan yang terakhir aspek bantuan sosial semacam zakat, wakaf, infaq, dan sedekah.³

Menurut hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang telah dipaparkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, menyatakan bahwa terdapat kenaikan indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia dari 8,93 persen ditahun 2019 menjadi 9,14

² Syamsuir. (2015). “Lembaga Keuangan Islam Non Bank”. *Jurnal Islamika*. Vol 15. No 01. hal 90

³ Mifta Novianti Putri. (2022). “Literasi Keuangan Syariah dan Kinerja UMKM”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 01 No. 02. hal. 82

persen ditahun 2022. Begitu juga dengan tingkat inklusi keuangan syariah yang mengalami peningkatan menjadi 12,12 persen di tahun 2022 dari sebelumnya 9,10 persen pada periode survei tahun 2019.⁴ Berikut merupakan tabel perbandingan antara indeks literasi dan inklusi keuangan syariah pada tahun 2019-2020.

Tabel 1.1 Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia

Indeks Syariah	2019	2022
Literasi Keuangan	8,93%	9,14%
Inklusi Keuangan	9,10%	12,12%

Sumber: Data yang diolah pada tahun 2022

Mengutip dari data Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025, menyatakan indeks literasi keuangan syariah pada tingkat provinsi tahun 2019, jika dilakukan perbandingan antara tingkat literasi keuangan syariah dan konvensional hasilnya masih cukup rendah. Tingkat literasi keuangan syariah di Provinsi Jawa Tengah mencapai 11,78%, dengan tingkat literasi keuangan konvensional mencapai 47,39%, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah yaitu 10,74%, dengan tingkat inklusi keuangan konvensional sebesar 65,45%. Artinya tidak sedikit

⁴ OJK. (2022). “*Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*”. Diakses pada link <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx> tanggal 10 januari 2023 pukul 21.00 WIB.

masyarakat di Jawa Tengah yang kurang terhadap pemahaman, pengetahuan, dan penggunaannya di lembaga keuangan syariah.⁵

Literasi dan inklusi keuangan syariah memiliki hubungan yang erat karena jika literasi seseorang meningkat maka, pengaruh terhadap tingkat penggunaan produk dan jasa keuangan di lembaga keuangan syariah juga akan semakin meningkat. Pada umumnya inklusi keuangan digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi tingkat kemiskinan di suatu negara. Dari definisi inklusi keuangan syariah sendiri yaitu keadaan dimana semua golongan masyarakat mampu menggunakan atau memanfaatkan berbagai layanan produk dan jasa keuangan yang tidak melenceng dari tuntunan syariat Islam.⁶

Inklusi keuangan syariah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan inklusif dengan cara mengurangi tingginya tingkat kemiskinan, meningkatkan pemerataan dan stabilitas sistem layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Inklusi keuangan syariah merupakan kegiatan untuk mengurangi segala bentuk hambatan baik berupa harga maupun non harga pada akses lembaga keuangan syariah. Tolak ukur dari inklusi keuangan syariah dapat dilihat dari kepemilikan rekening tabungan atau kredit baik dari lembaga

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (2021). “Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025”. Diakses pada link <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025.aspx> pada tanggal 10 Juni pukul 14.14

⁶ Safira Nindy Febriana. (2021). “Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus pada UMKM Kabupaten Malang)”. Vol. 16. No. 02. hal 60

keuangan bank atau non bank, serta suransi, investasi dan lain sebagainya. Hadirnya lembaga-lembaga keuangan terutama perbankan syariah diharapkan mampu meningkatkan taraf perkembangan ekonomi seseorang, salah satu paling penting terdapat pada para pelaku UMKM yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁷

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM adalah suatu aktivitas usaha yang dijalankan secara individu maupun kelompok dengan beberapa kriteria tertentu. Peran UMKM dalam pembangunan ekonomi selain dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang cukup besar di Indonesia.⁸ Terdapat 90% dari seluruh perusahaan yang ada di Indonesia adalah UMKM, dan mampu memberikan serapan lapangan tenaga kerja sekitar lebih 90% dari jumlah tenaga kerja di Indonesia. Kemudian kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) melebihi 20% dari jumlah hasil pendapatan negara.⁹

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) pada tahun 2021, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk

⁷ Risa Nadya Septiani dan Eni Wuryani. (2020). "Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Sidoarjo". *Jurnal Manajemen*. Vol 09. No 08 hal. 3218

⁸ Muhammad Akbar, Misbahudin dan Abd Wahab. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Perilaku Kewirausahaan Muslim Terhadap Kinerja Usaha Kecil (Studi Pada Usaha Kuliner di Kota Makassar)". *Jurnal Lembaga Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol 03 No. 01. hal. 26

⁹ Anindita Trinura Novitasari (2022). "Kontribusi UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah". *Journal of Applied Bussiness and Economic*. Vol 09. No 02 hal. 186

domestik bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau Rp 8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97% dari total angkatan kerja dan mampu menampung hingga 60,4% dari total investasi di Indonesia.¹⁰

Dalam mengembangkan usaha perlu diringi dengan pertumbuhan perkembangan sumber daya manusia dalam segala bidang. Tidak sedikit para pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki pengetahuan kurang terhadap proses pengelolaan keuangan yang tepat, baik kemampuan, keterampilan dan sikap, sehingga kurang berorientasi dalam jangka panjang. Upaya yang dilakukan masih bersifat konvensional karena kurangnya pengetahuan dalam bidang manajemen. Maka dari itu perkembangan sumber daya manusia dalam berwirausaha juga sangat diperlukan untuk kemajuan wirausaha itu sendiri.¹¹

Di Indonesia telah banyak tersebar pelaku UMKM mulai dari bisnis kuliner, kerajinan, fashion, industri dan lain sebagainya. Salah satunya yaitu Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai keragaman bentuk UMKM dalam segala bidang. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6

¹⁰ KPKNL Balikpapan. “*Peran Penting UMKM dalam Ancaman Isu Resesi*” Diakses pada link <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-balikpapan/baca-artikel/15677/Peran-Penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html#:~:text=Berdasarkan%20Data%20Kementerian%20Koperasi%20dan,Rp8.573%2C89%20triliun>. Tanggal 10 Agustus 2023 pukul 11.30 WIB

¹¹ Muhammad Akbar, Misbahudin dan Abd Wahab. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Perilaku Kewirausahaan Muslim Terhadap Kinerja Usaha Kecil (Studi Pada Usaha Kuliner di Kota Makasar). *Jurnal Lembaga Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol 03 No. 01. hal. 26

kota, namun terdapat beberapa daerah dengan urutan UMKM terbanyak. Berikut merupakan data urutan UMKM terbanyak di Jawa tengah yaitu:¹²

Tabel 1.2 Urutan Jumlah UMKM terbanyak di Jawa Tengah Indonesia

No	Kota/Kabupaten	Jumlah UMKM
1	Surakarta	17.965
2	Demak	13.024
3	Kebumen	11.989
4	Semarang	11.910
5	Banyumas	8.545

Sumber: Data yang diolah pada tahun 2023

Menurut tabel 1.2 diatas, Kabupaten Kebumen merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai unit UMKM terbesar ketiga setelah Kabupaten Demak dengan jumlah 11.989 unit UMKM, dengan menyerap tenaga kerja laki-laki 1.252 jiwa dan tenaga kerja perempuan 75 jiwa. Kabupaten Kebumen memiliki 26 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Kebumen. Kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen salah satunya yaitu Kecamatan Kebumen yang menjadi ibu kota sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Kebumen. Maka dari itu Kecamatan Kebumen merupakan kecamatan yang paling dekat dengan akses lembaga keuangan, dengan mempunyai jumlah 25 desa dan 5 kelurahan. Kebumen memiliki banyak

¹² Novi Silvia. (2023). "Lima Daerah yang Memiliki UMKM Terbanyak di Jawa Tengah". Diakses pada link https://bondowoso.jatimnetwork.com/ekonomi-bisnis/pr-1826533548/cilacap-minggir-dulu-5-daerah-ini-memiliki-umkm-terbanyak-di-jawa-tengah-ide-bagus-kurangi-pengangguran-nih?page=2&gl=1*13sszzf*ga*bURDQllhT20zUld6RWhfMnlR0xmbXVjNWlao0lmdnZCekoYVWdqV1dTSEZSX0s4ejAteEIlMkVJQlJoVkpNVw diakses pada tanggal 28 Mei 2023 pukul 09.10 WIB.

potensi yang bisa dikembangkan, maka dari itu, para pelaku usaha harus memiliki ketangguhan dalam menghadapi persaingan pasar yang serba ketat.¹³

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Kebumen. Adapun judul penelitian yang dilakukan penulis adalah **“Pengaruh Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Kebumen”**

¹³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kebumen>, Kebumen Diakses pada tanggal 28 Juli 2023. Pukul 11.57

B. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dibutuhkan agar penelitian dapat berjalan lebih mendalam dan lebih tepat sasaran karena mengingat dengan adanya ruang lingkup pembahasan yang luas. Pembatasan masalah dalam penelitian ini membahas tentang pengaruh literasi dan inklusi keuangan syariah terhadap kinerja usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kecamatan Kebumen. Adapun lokasi penelitian ini terdapat di wilayah Kecamatan Kebumen dari bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2023.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Kebumen?
2. Apakah inklusi keuangan syariah berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Kebumen?
3. Apakah literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Kebumen?

D. Penegasan Istilah

Judul dalam penulisan penelitian ini yaitu “Pengaruh Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Kebumen”. Mengenai hal tersebut maka dibutuhkan adanya penegasan istilah agar dapat terhindar dari

kesalahpahaman dalam penafiran terhadap istilah-istilah yang tercantum dalam judul. Berikut terdapat arti dari beberapa istilah yang perlu ditegaskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengaruh

Pengaruh menurut KBBI adalah daya yang timbul dari suatu benda atau seseorang yang mampu mempengaruhi sifat, perilaku, dan keyakinan seseorang terhadap sesuatu.¹⁴ Dalam penelitian ini pengaruh merupakan variabel X1 (literasi keuangan syariah) dan X2 (inklusi keuangan syariah) yang dapat menimbulkan perubahan terhadap variabel Y (kinerja UMKM).

2. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah adalah pemahaman seseorang mengenai pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah di atur dalam Islam untuk mencapai kesejahteraan. Secara istilah literasi keuangan syariah diartikan sebagai sifat perilaku seseorang dalam mengimplementasikan pemahaman, dan pengetahuannya dalam merencanakan sumber keuangan berdasarkan syariat Islam.¹⁵

3. Inklusi Keuangan Syariah

Berdasarkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), inklusi keuangan merupakan suatu akses pada lembaga keuangan yang dapat

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2022), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 849

¹⁵ Muhammad Akbar, Misbahudin dan Abd Wahab. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Perilaku Kewirausahaan Muslim Terhadap Kinerja Usaha Kecil (Studi Pada Usaha Kuliner di Kota Makasar). *Jurnal Lembaga Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol 03 No. 01. hal. 29

mengurangi berbagai bentuk hambatan dalam mengakses layanan jasa keuangan, sehingga dapat bermanfaat dan meningkatkan perkembangan hidup, terutama masyarakat dengan kondisi wilayah yang sulit dijangkau pada lembaga keuangan.¹⁶

4. Kinerja UMKM

Menurut Aribawa, Kinerja UMKM adalah suatu hasil kinerja individu atau kelompok berdasarkan tanggung jawab dari tugas atau kewajiban yang diberikan perusahaan dalam suatu waktu. Kemudian hasil dari kinerja tersebut akan dibandingkan dengan ukuran atau target perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁷

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap kinerja usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Kebumen
2. Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap kinerja usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Kebumen
3. Untuk mengetahui pengaruh literasi dan inklusi keuangan syariah terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Kebumen

¹⁶ Sindi Puspitasari. dkk. (2020). “Indeks Inklusi keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 04. No. 01. hal. 18

¹⁷ Tutik Siswanti (2020). “ Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurnya*. Vol. 05. No 02. hal. 67